

**DAMPAK EKSPLOITASI SUMBERDAYA ALAM KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TERHADAP (KONDISI) SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
THE IMPACT OF MARINE NATURAL RESOURCES AND FISHERIES  
EXPLOITATION TOWARD SOCIAL ECONOMIC ASPECTS OF THE SOCIETY**

Tonny D. Pariela

*Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik, Universitas Pattimura Ambon*

e-mail: tonnydpariela@gmail.com

**ABSTRAK**

Eksplorasi sumberdaya alam termasuk kelautan dan perikanan berpotensi menimbulkan dampak (positif dan/atau negatif) yang signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya yang terkoneksi. Tentu tujuan idealnya adalah ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dimaksud; meskipun seringkali sulit dihindari pula dampak negatif terhadap tatanan masyarakat. Lazim telah diketahui bahwa sumberdaya alam umumnya terdapat di daerah perdesaan di mana masyarakatnya berciri *gemeinschaft*. Masuknya kapitalisme uang melalui berbagai aktivitas eksploitasi sumberdaya alam termasuk misalnya yang akan dilakukan di Blok Masela, akan merubah tatanan masyarakat yang pada gilirannya akan tercermin dari cara pikir dan perilaku baik orang-perorangan maupun kelompok orang. Agar masyarakat setempat tidak mengalami alienasi, diperlukan pengembangan gagasan jaring pengaman sosial yang fungsional bagi penguatan posisi dan peran masyarakat setempat *vis a vis* kelompok masyarakat lainnya yang hidup bersama di wilayah eksploitasi dan sekitarnya.

*Kata kunci: Aliniasi, masyarakat, sumberdaya alam, eksploitasi,*

**ABSTRACT**

Exploitation of natural resources including marine and fisheries could potentially cause significant (positive and/or negative) impacts in the lives of local communities and its surrounding. Indeed, the ideal goal is to contribute to the efforts in increasing the welfare of the community; although it is often difficult to avoid the negative impact especially toward the social order. It is commonly known that natural resources are generally found in rural areas where the community used to be characterized by what commonly called *Gemeinschaft*. The inclusion of money capitalism through various activities of exploitation of natural resources including, let's say for an example, what will be done in Masela block, will change the social order of society which in turn will be reflected in the way of thought and behavior of both individuals as well as groups of people. In order for community not to experiencing alienation, it is necessary to develop an idea of social safety net in order to strengthening the position and the role of the community mentioned above *vis a vis* other groups of people which living together or side by side in the area of exploitation and its surrounding.

*Key word: Alienation, communities, natural resources, exploitation*

**PENDAHULUAN**

Eksplorasi sumberdaya alam berupa apapun dan di manapun dilakukan, dapat dipastikan berdampak pada pemanfaatan spasial termasuk implikasinya terhadap lingkungan (alam dan sosial budaya) serta kondisi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan masyarakat di sekitarnya yang terkoneksi. Meskipun aktivitas eksploitasi SDA khususnya SDA kelautan dan perikanan selalu berkonotasi padat modal (dan oleh karena itu sering disebut berciri kapitalistik) dan berteknologi tinggi, namun gagasan eksploitasi dimaksud tidak jarang disandarkan pula pada ekspektasi ideal tentang bagaimana upaya menyejahterakan masyarakat (sehingga terkesan sosialistik). Memang tidak mudah untuk menyandingkan secara sejajar kepentingan kapitalisme di satu pihak, dengan kesejahteraan masyarakat yang berciri sosialistik di pihak lain. Sesungguhnya tidak sederhana dan tidak semanis janji

kapitalisme tentang kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Jika pemikiran ini diletakkan dalam konteks pembangunan, maka menyikapi situasi tersebut misalnya, Quarles van Ufford, Kumar Giri, dan Mosse (*dalam* Quarles van Ufford dan Kumar Giri, 2004:14), telah mengingatkan dan secara deklaratif mengatakan bahwa wacana dan praktek pembangunan berada dalam ketidak-keselarasan yang kritis. Bahkan tidak jarang perdebatan akademik tentang pembangunan-pun, ditentukan oleh konteks historis dan politis sebagaimana yang terlihat misalnya dalam perdebatan James Scott (1976) dan Samuel Popkin (1979). Menurut Oscar Salamink (*dalam* Quales van Ufford dan Kumar Giri, 2004:268), Scott dalam tulisannya "*The Moral Economy of the Peasant*" merupakan representasi citra ilmuwan sayap kiri yang mencoba menunjukkan simpati dan empatinya terhadap perjuangan komunitas petani Vietnam; sementara Popkin yang menulis tentang "*The Rational Peasant*", menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan militer Amerika yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membangun bangsa Vietnam.

Sejak awal, memang gagasan pembangunan sudah mengandung misi progres (kemajuan) yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan sivilisasi (peradaban). Mengutip Mortimer (1973), dan Palmer (1978), Robinson (1986:3), misalnya mengatakan bahwa "... *economic growth, it is believed, will overcome the poverty and economic backwardness that characterise under-developed economic*". Jika substansi gagasan ini tidak berani dikoreksi agar bisa ditempatkan secara lebih tepat (proporsional) dan lebih pantas (*appropriate*), maka kesejahteraan sosial akan lebih tergantung dari – atau banyak ditentukan oleh pemilik modal. Hal ini disebabkan, negara seringkali diposisikan dilematis, karena tidak jarang pemerintah (atas nama negara) "digoda" dengan fasilitas tertentu oleh pemilik modal. Dengan demikian, pemerintah kerap kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan otoritasnya untuk memastikan distribusi kesejahteraan dapat dilakukan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks eksploitasi SDA, tentu situasi yang tidak menyenangkan ini berpotensi membawa dampak yang sangat serius baik terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya dan ekonomi (terutama) masyarakat setempat dan masyarakat di sekitarnya yang terkoneksi.

Rencana eksploitasi gas Blok Masela dan implikasi praksis dari penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), memang patut dipercekapkan secara komprehensif. Menakar manfaat dari rencana eksploitasi dimaksud dapat memberikan *guidence* yang tepat guna dan berdaya-guna bagi ketiga pihak (pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat) yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Paling tidak, selain ekspektasi terhadap "janji manis" kesejahteraan masyarakat bisa diraih, tetapi juga potensi destruksi dari proses eksploitasi dapat diminimalisasi. Dalam kerangka pikir itulah substansi gagasan dari *paper* ini akan diucapkan.

### **Karakter Objektif Masyarakat Perdesaan:**

Perdesaan adalah wilayah yang umumnya didiami oleh masyarakat (komunitas) dengan ciri-ciri yang unik terutama di Maluku. Kalau terminologi desa dalam hal ini bisa dimaknai sama dengan *negeri* sehingga kerap disebut pula sebagai desa adat, maka spesifikasi desa-desa adat atau *negeri* di Maluku memiliki kekhususan karena setiap desa adat atau *negeri* mempunyai otoritas masing-masing untuk mengatur rumah tangga dan mengelola aset yang dikuasainya (hak ulayat).

Sebagai komunitas yang berciri *gemeinschaft*, masyarakat perdesaan termasuk *negeri* di Maluku mempunyai struktur sosial yang terbuka (inklusif) namun terbatas. Menurut Ferdinand Tonnies, *gemeinschaft* dimaknai sebagai *all intimate, private, and exclusive living together ... is understood as life in Gemeinschaft (community)*. Yang dibedakannya dengan *gessellschaft (society)* yang mencirikan kehidupan publik dan berorientasi kekotaan yang bersifat mekanistik. Lazim diketahui terdapat 3 jenis *gemeinschaft* yaitu *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of place*, dan *gemeinschaft of mind*. Dalam konteks masyarakat perdesaan, para pendatang yang bukan pendukung kebudayaan setempat dapat diterima *welcome*, bahkan kerap diberikan peran-peran tertentu untuk melengkapi struktur di dalam masyarakat *negeri*. Meskipun demikian, perannya dapat dikatakan terbatas sebagai implikasi dari status yang terberikan (*achieved status*); berbeda dengan kelompok masyarakat asli setempat yang menempati status terlahirkan (*ascribed status*). Demikian halnya dengan sistim kepemilikan tanah (*land ownership system*) di mana dijumpai bagian terbesar kepemilikan dan penguasaan tanah adalah oleh desa adat/*negeri* atau klen. Masyarakat terutama komunitas adat, memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan tanah (*earthbound sense*). Konsep *gunung-tanah* yang jamak dikenal di Maluku Tengah misalnya, mencerminkan pandangan kosmologis tentang relasi manusia dengan yang dipertuhankan, leluhur dan sesama manusia.

Sebagai implikasi dari struktur masyarakat yang berciri komunitas, relasi-relasi sosial di antara sesama warga terlihat intim dan sarat diwarnai dengan ikatan-ikatan kekerabatan. Solidaritas yang tumbuh dan berkembang adalah solidaritas mekanis yang didasarkan atas “rasa” (bukan “rasio”), sehingga jarak sosial (*social distance*) terasa begitu pendek dan kohesivitas sosial tampak sedemikian kuatnya. Kenyataan ini sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim dalam bukunya *The Division of Labour in Society (1893)*, yang mengatakan bahwa *in a society exhibiting mechanical solidarity, its cohesion and integration comes from the homogeneity of individuals-people feel connected through similar work, educational and religious training, and lifestyle. Mechanical solidarity normally operates in traditional and small scale societies*. Bentuk solidaritas yang lain adalah solidaritas organik (*organic solidarity*) yang bermakna berbeda, umumnya dijumpai dalam masyarakat perkotaan. Dengan demikian, dapat dikatakan seluruh jenis *gemeinschaft* bisa dijumpai di dalam masyarakat perdesaan, dan di situlah sebetulnya terletak stabilitas struktur sosial. Distorsi terhadap salah satu sub-bagian dari struktur sosial dimaksud, akan menimbulkan instabilitas yang

mengganggu kehidupan bersama yang harmoni. Dalam kaitan itu, lazimnya pengendalian sosial didasarkan pada sistim nilai dan norma yang mengatur perilaku warga masyarakat secara keseluruhan. Lembaga-lembaga lokal yang ada dan berfungsi sebagai pengendali, merupakan katup pengaman (*safety valve*) yang sangat vital di dalam masyarakat.

Dewasa ini situasi masyarakat perdesaan termasuk di Maluku sudah semakin berubah. Mobilitas sosial terutama ke atas misalnya yang semula terbatas, kini dengan keterbukaan wilayah maka mobilitas sosial semakin dimungkinkan terjadi dan dialami oleh siapapun yang mempunyai kompetensi dan kapasitas tertentu. Dengan semikian, struktur masyarakat yang terbuka disertai perkembangan dunia pendidikan yang pesat dan kemudahan akses terhadap sumberdaya ekonomi, menyebabkan munculnya kategori-kategori sosial baru dengan ukuran-ukuran stratifikasi sosial yang baru pula. Meskipun tidak masif tetapi berdampak sistemik yang secara evolusif membawa perubahan di dalam tatanan sosial budaya. Dampak seperti ini biasanya akan bisa dirasakan dalam kurun waktu menengah dan terutama jangka panjang. Berbeda jika faktor yang memicu perubahan bersifat masif dan ekstrim. Kondisi demikian akan menciptakan perubahan yang juga masif, terstruktur dan sistemik, yang melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat dan masyarakat sekitar yang terkoneksi.

### **Eksploitasi SDA dan Perubahan Sosial Ekonomi:**

Pada umumnya SDA termasuk yang bernilai ekonomi tinggi, tersedia atau terletak di wilayah perdesaan; tempat di mana banyak dijumpai masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan dan keakraban sebagai warga suatu komunitas. Keberadaan SDA dimaksud merupakan *pull factor* yang menarik para investor untuk menanamkan modalnya dan mengeksploitasi SDA tersebut. Investasi dalam bidang SDA kelautan dan perikanan umumnya bersifat padat modal dan kerap disertai dukungan teknologi tinggi. Ini memberi indikasi bahwa keterlibatan di dalam proses eksploitasi (bahkan eksplorasi sebelumnya), memerlukan ketrampilan tertentu. Kebutuhan SDM dengan kualifikasi tertentu itulah yang seringkali tidak bisa dijumpai di tingkat lokal, sehingga harus didatangkan dari luar wilayah. Selain itu, aktivitas eksploitasi pun akan memicu migrasi orang dengan jumlah yang lebih besar dalam rangka mengembangkan bisnis yang mendukung aktivitas eksploitasi termasuk pusat-pusat hiburan. Kenyataan ini akan menyebabkan tingginya kebutuhan *space* untuk kepentingan permukiman dan lahan usaha. Menghadapi situasi demikian, tidak jarang masyarakat setempat tergoda untuk menjual aset (lahan dan/atau bangunan) yang dimiliki, yang dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Artinya, kehadiran banyak pendatang akan merubah peta demografi, tata ruang fisik dan tata ruang sosial yang (sangat) serius.

Masyarakat desa yang sebelumnya kurang mempunyai pengalaman perjumpaan dengan orang atau kelompok orang lain dalam jumlah yang banyak dan dengan latar belakang kultur yang berbeda-beda, kini tidak bisa menghindarkan diri dan harus menghadapi kenyataan tersebut. Dinamika ini akan menjadi kejutan bagi masyarakat

setempat dan oleh karena itu membutuhkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tidak jarang proses ini menimbulkan *culture shock* dan *cultural lag* hingga mal-adaptasi (gagal beradaptasi) sebagai manifestasi dampak negatif yang semestinya dapat diperhitungkan dan dihindari. Seperti yang diketahui bahwa konsep *culture shock* pertama kali diintroduksi oleh Oberg (1960), menggambarkan tentang respons yang mendalam dan negatif dari depresi, frustrasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Sementara oleh Wikipedia, *culture shock* didefinisikan sebagai ... *an experience a person may have when one move to a cultural environment which is different from one's own; it is also the personal disorientation a person may feel when experiencing an unfamiliar way of life due to immigration or a visit to a new country, a move between social environment, or simply transition to another type of life.* ... Selain itu, *cultural lag* atau Ketertinggalan (kesenjangan) budaya adalah suatu kondisi di mana terjadi perbedaan tingkat kemajuan di antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan, karena ada yang berkembang dan tumbuh dengan cepat dan yang lainnya kurang berkembang atau bertumbuh dengan lambat. Menurut sosiolog Williams F. Ogburn ... *material culture tends to develop and advance at a faster rate than non-material culture. Material culture is the physical and tangible aspects of culture including technology, buildings and tools. Non-material culture is the aspect of culture that isn't, nor is it tangible. Non-material culture includes cultural values, morals, and religion.* Dalam bahasa yang berbeda, *cultural lag is a common societal phenomenon due to the tendency of material culture to evolve and change rapidly and voluminously while non-material culture tends to resist change and remain fixed for a far longer period of time.*

Memang sangat diharapkan bahwa eksploitasi SDA akan mendinamisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan kawasan, sehingga bisa berkontribusi bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Keinginan yang ideal ini tentu disertai harapan agar dampak negatif terhadap masyarakat setempat dan di sekitarnya bisa diminimalisasi.

### **Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*):**

Rekayasa sosial dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya yang terkoneksi, merupakan keniscayaan atau kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Hal ini dilakukan semata-mata untuk (1) membangun kepercayaan diri masyarakat menghadapi interaksi dengan para pendatang yang umumnya dipersepsikan lebih unggul; (2) mengembangkan kapasitas intelektual agar masyarakat lebih memahami konteks eksploitasi SDA secara lebih luas, sehingga mereka mampu memposisikan dirinya di tengah arus perubahan yang sementara berlangsung; (3) membangun kapasitas teknis guna mempersiapkan masyarakat terlibat dalam proses eksploitasi atau bisnis pendukung lainnya; (4) sebagai media konsolidasi sosial bagi masyarakat setempat guna memelihara identitas lokal sebagai *symbolic engine* yang mempersatukan dan memberdayakan masyarakat. Makna *Symbolic engine* di sini adalah aset sosial dan kultural yang mencerminkan potensi kekuatan

suatu masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan dirinya atas dasar orientasi nilai-nilai lokal.

Rekayasa sosial untuk membangun jaring pengaman sosial (JPS) adalah sebuah langkah protektif yang sangat penting dan strategis. Dalam Wikipedia, JPS diartikan sebagai ... *a collection of services provided by the state or other institutions such as friendly societies* (<https://en.wikipedia.org>). Program ini bisa disinergikan dengan rencana eksploitasi, dan dilaksanakan baik pada tahapan sebelum maupun sepanjang proses eksploitasi berlangsung. Paling tidak melalui program ini, ada upaya yang cukup sistematik, metodis dan terukur untuk mencegah degradasi mutu lingkungan (alam dan sosial) yang mengorbankan kepentingan (terutama) masyarakat setempat. Selain *state* (pemerintah dan pemerintah daerah), maka aktor yang potensial berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *non-state actors* lainnya termasuk universitas. Kolaborasi peran di antara para aktor akan menjadi daya dorong yang pada gilirannya menempatkan masyarakat pada posisi tukar yang strategis.

Posisi masyarakat setempat yang kuat terhadap investor, ditengarai dengan sendirinya akan “memaksa” investor untuk berdialog dalam rangka kepentingan masyarakat. Tanpa *bargaining power* yang dimiliki masyarakat melalui proses pemberdayaan mereka, tidak pernah mungkin masyarakat akan mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) yang memadai *vis a vis* investor. Oleh karena itu, semestinya proses negosiasi dan translasi sudah dimulai sejak proses eksplorasi atau tahapan awal sebelum memulai eksploitasi. Secara teoritik, pemikiran ini didasarkan pada *indigenous perspective on development* yang digagas oleh Vincent Tucker (Munck and O’Hearn, 1999). Menurut Tucker, masyarakat dimanapun, selalu berada dalam dinamika melalui proses negosiasi dan translasi untuk memberi pemaknaan terhadap realitas objektif yang sementara dihadapi mereka. Dengan demikian, entitas lokal mempunyai kontribusi pula dalam perubahan sosial yang dihasilkan melalui proses negosiasi dan translasi tersebut. Oleh sebab itu, substansi dari *indigenous perspective* adalah, bagaimana masyarakat lokal dapat dilibatkan melalui media dialog secara terhormat. Proses dialogis dimaksud, merupakan *win-win strategy* yang akan menguntungkan semua pihak (masyarakat, investor dan pemerintah/ pemerintah daerah), menciptakan stabilitas sosial dan keamanan sebagai prasyarat kondisional bagi dinamika aktivitas ekonomi. JPS, dengan demikian bermakna sebagai pelindung sekaligus pengembangan yang dirancang untuk membantu memberdayakan masyarakat setempat yang potensial terdampak aktivitas eksploitasi SDA.

Eksploitasi SDA apapun termasuk SDA kelautan dan perikanan, lazim diawali dengan studi kelayakan dan pemetaan sosial (*social mapping*). Oleh karena itu, sebetulnya potensi keuntungan secara ekonomis dan sosial, serta potensi kerusakan lingkungan alam dan lingkungan sosial semuanya bisa diprediksi dengan baik. Artinya, perubahan sosial ekonomi yang disebabkan beroperasinya eksploitasi SDA adalah terukur. Jika skenario JPS bisa dirancang-bangun dan diterapkan secara konsisten sesuai rekomendasi hasil *feasibility study*

dan *social mapping*, diyakini potensi dampak negatif bisa diminimalisasi. Dampak negatif yang dikuatirkan secara garis besar, paling tidak ada empat yaitu (1) munculnya kesenjangan ekonomi antara warga masyarakat pendatang dengan warga masyarakat setempat (asli); (2) keadilan akses bagi warga masyarakat dalam memanfaatkan berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh investor/perusahaan; (3) munculnya berbagai penyakit sosial hingga tindak kriminal yang marak di dalam masyarakat; (4) berubahnya *life style* dan budaya masyarakat setempat pada umumnya.

Sebagai sebuah skenario pengamanan, JPS yang dibuat semestinya sudah dan harus mengakomodasi berbagai program/kegiatan untuk merespons keempat masalah besar yang berpotensi terjadi sepanjang eksploitasi SDA.

### **Catatan Penutup:**

Kalau gagasan dalam percakapan ini hendak diorientasikan pada proses eksploitasi Blok Masela, maka beberapa catatan aksentuatif dapat dikemukakan dan sangat baik jika bisa dipertimbangkan untuk diimplementasikan sebagai berikut:

(1) Tentu sudah banyak *social mapping* yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akan sangat bermanfaat jika UNPATTI dapat mengajak berbagai pihak tersebut untuk bersama-sama membahas, mensinergikan hasil temuan dan rekomendasi mereka menjadi satu dokumen yang terintegrasi; dokumen yang akan menjadi acuan bersama semua institusi yang berkompeten. Pendekatan ini dipandang penting, terutama untuk menghindari kemungkinan rekomendasi yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya, sekaligus mendorong efektivitas kerja dari berbagai lembaga yang berkompeten.

UNPATTI sebagai *leading institution* dalam bidang pendidikan di Provinsi Maluku, seyogianya bisa mengarahkan perencanaan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharna penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk di wilayah Blok Masela dan sekitarnya. Dengan demikian, berbagai hasil penelitian dan pengabdian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat dalam berinteraksi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat pendatang lainnya yang bermigrasi ke daerah tersebut karena aktivitas eksploitasi.

Selain itu, untuk memastikan bahwa proses persiapan hingga implementasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Blok Masela dapat menempatkan masyarakat setempat pada posisinya yang terhormat, maka UNPATTI dapat membentuk lembaga yang secara khusus memberikan perhatian pada aktivitas dimaksud.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah setempat sejak dini harus bersungguh-sungguh mengendalikan proses pengambil-alihan hak atas tanah baik untuk kebutuhan lahan perusahaan maupun yang dilakukan oleh para pihak spekulasi. Kondisi ini harus dipandang serius, karena pengambil-alihan tersebut sangat berdampak pada perubahan struktur sosial dan garansi bagi masa depan kehidupan warga masyarakat setempat. Informasi lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber, menegaskan betapa banyak aset

tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat, kini sudah beralih kepemilikan. Ke depan, kondisi dimaksud akan membatasi akses masyarakat setempat terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk menghilangkan jejak kepemilikan lahan yang sebetulnya dapat ditelusuri terkait dengan garis keturunan marga-marga dalam struktur masyarakat setempat. Bukannya tidak mungkin keterbatasan masyarakat mengakses lahan, akan menimbulkan konflik horisontal bahkan (mungkin) vertikal di masa yang akan datang.

- (3) Eksternalitas sebagai biaya yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh investor akibat munculnya dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi, harus dibicarakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Biaya eksternalitas ini sangat mungkin dinegosiasikan untuk membiayai pembentukan dan implementasi JPS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Crewe, Emma and Elizabeth Harrison. 1988, *Whose Development? An Ethnography of Aid*, Zed Books, London and New York.
- Munck, Ronaldo and Dennis O'Hearn (eds). 1999, *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*, Zed Books, London and New York,
- Robinson, Kathryn M. 1986, *Stepchildren of Progress – The Political Economy of Development in An Indonesian Mining Town*, State University of New York Press, Albany.
- Tonnies, Ferdinand. 1967, *Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft)*, diterjemahkan dan diedit oleh Charles P. Loomis, New York: Harper and Row.
- van Ufford, Philip Quarles dan Ananta Kumar Giri (eds). 2004, *Kritik Moral Pembangunan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.